

**Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam  
Perkara Pencemaran Nama Baik  
Atven Vemanda Putra, Al. Wisnubroto S.H.,M.Hum Program Studi Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

***Abstract***

*Criminal offense of defamation through electronic media is one of several types of cybercrime types that exist. Defamation offenses arising from the negative impacts of the development of the information and communication technology global society, resulting in changes in people's behavior patterns in such fields as computer misuse. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely : How does the application of Clause 27 paragraph (3) of Statute No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions in a defamation case ? and How does thinking about the defamation provisions through electronic media in the future ?. This research is normative, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. Results of this study indicate that the application of the provisions of defamation through electronic media is still referring to the pattern of retributive justice which tend to promote the criminal sentencing process. Defamation provisions through electronic media is still regulated in a separate law that could potentially lead to differences in the perception of law enforcement in Indonesia. Formulation of the draft new Code can be used as an alternative to integrate the provisions of the Act ITE with the provisions of the Criminal Code .*

***Keywords : cybercrime, the defamation provisions through electronic media  
in future, electronic criminal defamation***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis<sup>1</sup>, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Menurut

---

<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk monodualis, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang bertahan untuk kelangsungan hidupnya dengan berinteraksi dengan manusia yang lain.

Zamris Habib, interaksi merupakan salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia berupa kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari aktivitas komunikasi dengan manusia lainnya. Dalam masyarakat tradisional (*Traditional Society*) aktivitas komunikasi dilakukan dengan cara yang sederhana melalui komunikasi verbal dengan tatap muka secara langsung. Perkembangan kebudayaan dan teknologi kemudian membawa manusia untuk melakukan komunikasi secara nonverbal melalui simbol yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan manusia lain seketika itu atau untuk waktu selanjutnya. Proses komunikasi semacam ini bertujuan untuk melakukan pertukaran informasi antar individu dengan melakukan penyimpanan data melalui media tertentu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, terjadi pergeseran paradigma mengenai komunikasi dari masyarakat tradisional (*Traditional Society*) menjadi masyarakat modern (*Modern Society*). Proses pergeseran paradigma ini mengakibatkan munculnya tuntutan kebutuhan akan komunikasi maupun informasi yang lebih cepat dan luas tanpa terbatas ruang maupun waktu. Perkembangan masyarakat akan kebutuhan komunikasi dan informasi ditanggapi dengan kemajuan teknologi Informasi berbasis elektronik yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain ditempat yang berbeda maupun bertukar informasi dengan orang lain tanpa terbatas waktu melalui *Cybermedia* atau yang dikenal sebagai *Cyberspace*.

*Cyber communication media* (media komunikasi siber) dapat diibaratkan sebagai dimensi dunia yang lain. Dimensi ini sifatnya maya namun nyata karena tanpa hadir secara fisik user dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan user lain tanpa dibatasi jarak maupun waktu. Melalui *Cyberspace*, *user* melakukan pertukaran informasi berupa data dengan *user* lain sama seperti ketika terjadi interaksi konvensional. Interaksi yang terjadi melalui *Cyberspace* memiliki kesamaan proses dengan interaksi konvensional karena terjadi proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Bentuk interaksi yang terjadi melalui *Cyberspace* dan interaksi konvensional memiliki kesamaan karena melalui interaksi tersebut akan muncul proses yang asosiatif maupun disosiatif. Dalam sudut pandang hukum, proses disosiatif akan memicu munculnya *Cybercrime* (kejahatan siber) maupun kejahatan konvensional. *cybercrime* dapat di deskripsikan sebagai suatu bentuk kejahatan baru karena dilakukan melalui *cybermedia* walaupun bentuk kejahatannya konvensional. *Cybercrime* dapat juga dideskripsikan sebagai kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang menimbulkan persepsi bahwa kejahatan

---

<sup>2</sup> <http://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi-bag-2/>  
diakses minggu 18/3/2012 pukul 11.00 WIB

tersebut bersifat baru. Dalam persepsi ilmu Kriminologi, *Cybercrime* dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional yang dilakukan dengan cara-cara yang baru yakni menggunakan teknologi informasi.

Kasus pencemaran nama baik kembali muncul pada tahun 2009 yang menjerat Prita Mulyasari dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE karena menyampaikan keluhan melalui surat elektronik (*e-mail*) mengenai buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI International Tangerang. Prita Mulyasari sempat menjalani penahanan selama 3 minggu dan kemudian diubah statusnya menjadi tahanan kota karena keluhannya di surat elektronik dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik apabila telah terlihat dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Menyerang kehormatan seseorang pada dasarnya sangat berbeda dengan kritik maupun keluhan, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan unsur perbuatan pidana dalam ketentuan hukum agar tidak menimbulkan *second victim* karena kekeliruan melihat suatu perkara.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menengahkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik ?
2. Bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik di masa mendatang ?

### **ISI MAKALAH**

#### **A. Teknologi Informasi dan Dampaknya dalam Media Komunikasi**

1. Pengertian Teknologi Informasi dan jenis-jenisnya

Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara tidak langsung telah mengubah kebudayaan *Tradisional Society* ke arah *Modern Society*. Perubahan kebudayaan masyarakat terlihat dari meningkatnya intensitas penggunaan teknologi dalam melakukan komunikasi antar individu dalam masyarakat. Proses pergeseran paradigma ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan komunikasi maupun informasi yang lebih cepat dan luas tanpa terbatas ruang maupun waktu semakin besar. Perkembangan masyarakat akan kebutuhan komunikasi dan

informasi ditanggapi dengan kemajuan teknologi Informasi berbasis elektronik yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain ditempat yang berbeda maupun bertukar informasi dengan orang lain tanpa terbatas waktu melalui *Cybermedia* atau yang dikenal sebagai *Cyberspace*.

Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai sebuah teknik mengolah data elektronik menjadi bentuk informasi. Data dapat diolah menjadi beragam bentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari *user*. Data hasil olahan tersebut dapat berupa tulisan, gambar, dan suara yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar *user*. Perkembangan teknologi informasi dibidang telekomunikasi memungkinkan terjadinya interaksi antar individu tanpa terbatas tempat dan waktu. Perkembangan perangkat telekomunikasi saat ini sudah mengacu pada teknologi digital yang lebih praktis dan multifungsi untuk melakukan atau menerima panggilan, mengirimkan atau menerima pesan berupa tulisan maupun gambar dalam hitungan detik secara digital. Perkembangan perangkat telekomunikasi mengakibatkan pertukaran informasi (*Information Transfer*) berlangsung semakin cepat sehingga *user* tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengirimkan atau menerima pesan.

Teknologi informasi modern erat kaitannya dengan keberadaan *cyberspace* sebagai ruang aktivitas pengolahan data yang dilakukan oleh *user*. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia diantaranya :

a. Dampak Positif

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengolah, menyimpan, membuat, memindah, maupun mengirimkan data secara cepat dan efektif

b. Dampak Negatif

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi modern memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus berada ditempat yang sama sehingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana terjadinya kejahatan.

## **B. Pencemaran Nama Baik dan Implikasi Hukumnya**

### **1. Pengertian pencemaran nama baik dan jenis-jenisnya**

Pencemaran nama baik pada dasarnya terdiri dari dua unsur, tindakan pencemaran dan objek tindakan berupa nama baik seseorang. Kata pencemaran dapat

dimaknai sebagai perbuatan/tindakan seseorang terhadap suatu objek yang mengakibatkan perubahan kualitas terhadap objek tersebut. Sedangkan nama baik dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan eksistensi seseorang dalam masyarakat. Eksistensi tersebut mencakup harkat dan martabat seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Pencemaran terhadap nama baik seseorang merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan nama baik seseorang menjadi tercemar atau tidak lagi baik dalam pandangan orang lain, menimbulkan opini secara umum mengenai reputasi seseorang yang kurang baik, mengakibatkan kredibilitas seseorang menjadi turun dan lain-lain. Perbuatan pencemaran yang dilakukan terhadap nama baik seseorang selalu didasari oleh niat pelaku untuk menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain, dalam hal ini reputasi/nama baik seseorang. Pencemaran nama baik oleh KUHP diartikan sebagai serangan yang ditujukan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum<sup>3</sup>. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan, diantaranya :

a. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional

Pencemaran nama baik seperti ini cenderung dilakukan dengan cara-cara biasa, baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik secara lisan dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang didepan orang lain. Pencemaran nama baik secara tertulis dilakukan dengan membuat tulisan atau gambar manual yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pada sebuah media yang kemudian di sebar dengan maksud untuk diketahui oleh orang lain.

b. Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pencemaran nama baik seperti ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik secara lisan dapat dilakukan melalui telepon atau penransmisian pesan suara dengan mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pencemaran nama baik tertulis dilakukan dengan mentransmisikan tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 310 ayat (1) KUHP

Tindak pidana pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya :

1) Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran

Ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :

- a) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan
- b) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasikan

2) Pasal 311 KUHP tentang fitnah

Ketentuan Pasal 311 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

3) Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan

Ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.

4) Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah

Ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

5) Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu

Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

6) Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal

Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Karakteristik pencemaran nama baik melalui media elektronik

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenali dengan mencermati beberapa hal, diantaranya :

- a. Perbuatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- b. Objek tindak pidananya berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik
- c. Objek tindak pidana tersebut didistribusikan atau ditransmisikan, melalui jaringan dan dapat atau telah diakses oleh orang lain
- d. Isi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik tersebut bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang
- e. Perbuatan tersebut telah melanggar kepentingan hukum orang lain.

Pencemaran nama baik dikatakan sebagai *cybercrime* apabila memenuhi kriteria tersebut di atas. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi sebagai sarana dalam melaksanakan tindak pidana. Pemanfaatan teknologi informasi ini menimbulkan konsekuensi adanya perubahan objek tindak pidana yang semula berupa nama baik/ kehormatan seseorang menjadi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mempunyai muatan pencemaran. Perbedaan objek tindak pidana tersebut, mengakibatkan perubahan cara pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik harus dilakukan dengan menggunakan metode tertentu yang didasarkan kepada teori telematika karena tindak pidana yang terjadi dilakukan dengan teknik khusus dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

3. Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur tersendiri menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Tahap mengklasifikasikan perkara harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan menerapkan hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum individu.

Kepentingan hukum individu meliputi :<sup>4</sup>

- a. Jiwa manusia (*leven*);
- b. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- c. Kehormatan seseorang (*eer*);
- d. Kesusilaan (*zede*);
- e. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- f. Harta benda/kekayaan (*vermogen*)

### C. Gagasan pengaturan pencemaran nama baik di masa datang

1. Kritik terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE Indonesia sebagai Negara hukum menganut paham demokrasi yang mengedepankan hak-hak konstitusional warganya. Sebagai salah satu bentuk langkah pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak konstitusional tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang ITE. Pemberlakuan Undang-Undang ITE menuai banyak kontroversi bahkan ketika masih dalam tahap RUU karena dinilai akan memasung kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui media elektronik. Ketakutan kalangan pers semakin bertambah dengan munculnya beberapa kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang ITE, Narliswandi Piliang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ITE kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian tersebut salah satunya menyoroti pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang dinilai sebagai “pasal karet” karena bunyi pasal tersebut tidak membedakan secara jelas, mana aktivitas jurnalistik yang memiliki kaedah dan pengaturan secara tersendiri, dengan produk penghinaan yang menyerang pribadi seseorang.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" dianggap tidak jelas dan tidak lengkap sehingga berpotensi menjerat pihak yang melakukan akses menggunakan teknologi informasi untuk berinteraksi dengan orang lain.

---

<sup>4</sup> Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.



Berdasarkan permohonan pengujian tersebut, Mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dalam amar putusannya “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya :<sup>5</sup>

- a. ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F UUD 1945
- b. kebebasan pers dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah pers
- c. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE diperlakukan sama dengan Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan menolak permohonan pengujian Undang-Undang ITE, maka ketentuan tersebut masih tetap berlaku. Dengan tetap berlakunya ketentuan Undang-Undang ITE secara khusus Pasal 27 ayat (3), maka penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik harus mengacu pada ketentuan tersebut. Disisi lain ketentuan Pasal 27 ayat (3) masih harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan kontroversi terutama dalam hal penerapan hukumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 poin [3.17.1], mahkamah menyatakan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti*.<sup>6</sup> Berdasarkan pernyataan mahkamah tersebut, seharusnya terdapat kesinambungan antara ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Mengacu pada putusan Mahkamah konstitusi tersebut, terlihat bahwa Pasal 27 ayat (3) masih multitafsir diantaranya :

- 1) Penggunaan frasa “ penghinaan dan/atau pencemaran” dalam Pasal 27 ayat (3) menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran merupakan dua perbuatan yang berdiri sendiri. Pengaturan tersebut bertentangan dengan KUHP yang mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 sebagai jenis penghinaan.
- 2) Perumusan objek tindak pidana berupa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat (3) masih belum jelas. Rumusan tersebut tidak menjelaskan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik seperti apa

---

<sup>5</sup> Diintisarikan berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. hlm.110

yang dilarang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3). Apabila mengacu pada ketentuan KUHP, maka penggunaan frasa “ penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUHP.

- 3) Perumusan unsur perbuatan “ mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya “ menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini ditujukan untuk menjerat subjek hukum yang menyebarkan objek pidana yang diatur oleh pasal ini dan bukan menjerat orang yang membuat konten yang dilarang dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Perumusan unsur perbuatan tersebut tidak akurat dan tepat sasaran.

2. Prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi yang terdiri dari berbagai budaya telah memberikan jaminan terhadap hak-hak demokratis warga negara yang dituangkan dalam UUD 1945. Setiap warga negara mempunyai hak :

- a. dalam memilih/memberikan suara,
- b. berbicara/Kebebasan pers,
- c. beragama,
- d. bergerak,
- e. berkumpul.

Hukum sebagai sebuah sistem memberikan kebebasan sekaligus batasan terhadap aktivitas sosial. Salah satu pembatasan aktivitas individu dituangkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memuat larangan aktivitas sosial yang disosiatif berupa pencemaran nama baik dengan cara menyerang kehormatan seseorang secara lisan maupun tertulis. Ketentuan KUHP mengatur pencemaran nama baik secara konvensional sedangkan Pasal 27 ayat (3) mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara modern. Ketentuan pencemaran nama baik dibuat untuk melindungi kepentingan hukum (*eer*) individu dari dampak interaksi sosial yang disosiatif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE merupakan jenis delik aduan sehingga keberadaan unsur pengaduan bersifat mutlak. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik ini berkaitan dengan sifat privat yang dimiliki oleh objek pidana dalam perkara.

3. Nilai-nilai tata krama ketimuran

Kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua

masyarakat (William H. Haviland). Tatanan norma yang terdiri nilai-nilai luhur suatu bangsa secara tidak langsung membentuk karakter bangsa itu sendiri dan menjadi acuan bagi individu yang ada didalamnya.

Pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat kearah modernisasi yang cepat berpotensi menimbulkan pola interaksi disosiatif dalam masyarakat. Interaksi disosiatif tersebut diatur dalam Undang-Undang ITE berupa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang salah satunya adalah konten pencemaran. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan seseorang menyerang kehormatan orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dikatakan sebagai dampak interaksi disosiatif. Dampak perkembangan Teknologi Informasi tersebut dapat diminimalisir apabila nilai-nilai tata krama ketimuran tetap menjadi *guidance* dalam pola interaksi modern.

#### 4. Gagasan pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan dampak disosiatif dalam masyarakat. Keberadaan nilai-nilai tata krama ketimuran di Indonesia merupakan salah satu *guidance* dalam interaksi masyarakat. Kegiatan interaksi masyarakat sebagai sebuah kebutuhan individu akan selalu berhubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi sebagai bentuk pengakuan terhadap kepentingan hukum individu. Kebebasan berekspresi dalam masyarakat sebagai prinsip dasar interaksi sosial harus diimbangi dengan regulasi hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum individu. Keberadaan ketentuan hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk menghindari munculnya dampak disosiatif dari interaksi sosial. Dampak disosiatif tersebut dapat berupa pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara konvensional maupun dengan cara-cara modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media elektronik. Ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut masih harus dikritisi, karena masih memuat

beberapa hal yang kurang jelas diantaranya mengenai perumusan perbuatan pencemaran nama baik, klasifikasi antara pencemaran dan penghinaan, serta perumusan unsur perbuatan yang tidak akurat. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dan subjektif ketentuan Undang-Undang ITE membentuk suatu kondisi tertentu yang dimaksudkan oleh hukum sebagai suatu cara/ metode dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008 poin [3.17], penerapan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa sesungguhnya ketentuan Undang-Undang ITE tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUHP sebagai norma hukum pokoknya.

Ketentuan KUHP sebagai norma hukum pokok telah mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik namun belum mencakup perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, sedangkan ketentuan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik masih belum dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran. Kedua persoalan diatas dapat diakomodasi melalui adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana tahun 2012 sudah mencantumkan mengenai pencemaran nama baik. Rumusan pencemaran nama baik tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Rumusan Pasal 537 rancangan KUHP diatas mengatur perbuatan pencemaran nama baik secara konvensional, sehingga tidak dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Kedudukan rancangan KUHP sebagai *ius constituendum* masih memberi peluang untuk terjadi perubahan karena belum diundangkan sehingga belum memiliki kekuatan hukum. Peluang terjadinya perubahan pada draf rancangan KUHP dapat dijadikan alternatif untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik adalah memberikan pengaturan tambahan pada Pasal 537 draf rancangan KUHP untuk mengatur perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan Pasal 537 terdiri dari 2 (dua) ayat yang mengatur tindak pidana pencemaran secara konvensional dan 1 (satu) ayat pengecualian. Rancangan KUHP yang baru merupakan bentuk unifikasi hukum sehingga ketentuan hukum pidana akan diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan. Proses unifikasi tersebut telah menintegrasikan sebagian ketentuan Undang-Undang ITE kedalam draft rancangan KUHP misal, Paragraf 3 Pasal 379 tentang pornografi anak melalui computer. Integrasi ketentuan ITE dalam Pasal 379 merupakan bentuk upaya antisipatif dan proaktif dalam mengatur Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi di dunia maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, integrasi ketentuan ITE kedalam KUHP merupakan integrasi ketentuan *cybercrime* termasuk didalamnya mengenai Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Proses integrasi ketentuan ITE kedalam draf rancangan KUHP masih belum komprehensif karena dalam ketentuan Pasal 537 tentang pencemaran nama baik belum mengakomodir tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sehingga sudah selayaknya diintegrasikan kedalam rancangan KUHP Pasal 537.

---

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Buku Kedua poin ke 2 draf rancangan KUHP

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan pencemaran melalui media elektronik dapat dimasukkan sebagai ayat sebelum ayat pengecualian sehingga konstruksi pasalnya menjadi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama ... (...) tahun atau pidana denda paling banya ....*
- (4) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Proses penyusunan KUHP membutuhkan waktu yang panjang, oleh karena itu untuk tetap dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum individu diperlukan regulasi hukum yang efektif. Upaya penanggulangan pencemaran nama baik haruslah mempertimbangkan asas kemanfaatan dengan mengklasifikasikan suatu perbuatan tidak hanya berdasarkan aspek hukum yang ada namun juga harus mempertimbangkan upaya penyelesaian yang konservatif.

Mengacu pada konsep *restorative justice*, upaya penyelesaian perkara pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui proses mediasi ditingkat kepolisian dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari atau memutuskan cara terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (*decide how best to repair the harm*).<sup>9</sup> Upaya penyelesaian perkara pencemaran nama baik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkara sehingga dapat dilakukan upaya memperbaiki untuk kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>9</sup> Pendapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber DITRESKRIMSUS POLDA DIY

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI, penyelesaian perkara pencemaran nama baik ditingkat penyelidikan dapat dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum sesuai dengan tugas pokok Kepolisian RI. Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan konsep *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik saat ini.

### **Kesimpulan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu kepada pola *retributive justice* yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik maupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Hamzah, Andi, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta  
Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta  
Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta  
Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta  
Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, esdisi VI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
Wisnubroto , Al., 2010, *Strategi penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Tahun 1945  
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008  
Putusan Mahkamah Agung No.822k/Pid.Sus/2010, atas nama terdakwa Prita Mulyasari  
Putusan Mahkamah Agung No.22 PK/Pid.Sus/2011, atas nama terdakwa Prita Mulyasari  
Putusan Mahkamah Agung No.300/K/Pdt/2010, atas nama Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional  
Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.151/PID/2012/PT.BTN, atas nama terdakwa dr Ira Simatupang Sp.OG  
Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.71/Pdt/2009/PT.BTN, atas nama Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional  
Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.232/Pid .B/2010/PN.Kdl, atas nama terdakwa Drs Prabowo  
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1269/PID.B/2009/PN.TNG, atas nama terdakwa Prita Mulyasari



Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.236/Pid.Sus/2012/PN.TNG, atas nama terdakwa dr Ira Simatupang Sp.OG

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2008/TNG, atas nama Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional

### **Rancangan Peraturan Perundang-Undangan**

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tahun 2012)

### **Internet**

[http://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi komunikasi-bag-2/](http://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi-bag-2/) diakses minggu 18/3/2012 pukul 11.00 WIB

[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI%20PENGERTIAN%20DAN%20JENIS%20CYBERCRIME%20BERIKUT%20MODUS%20OPERANDINYA&&nomorurut\\_artikel=353](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI%20PENGERTIAN%20DAN%20JENIS%20CYBERCRIME%20BERIKUT%20MODUS%20OPERANDINYA&&nomorurut_artikel=353); 20 maret 2012